



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tahun Sidang                    | : 2021-2022   |
| Masa Persidangan                | : III   |
| Rapat ke                        | : 8 (delapan)   |
| Jenis Rapat                     | : Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual  |
| Dengan                          | : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan   |
| Sifat Rapat                     | : Terbuka   |
| Hari/tanggal                    | : Kamis, 20 Januari 2022  |
| Pukul                           | : 10.00 WIB – selesai   |
| Acara                           | : Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Pembahasan Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022.   |
| Ketua Rapat                     | : Emanuel Melkiades Laka Lena / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  |
| Sekretaris Rapat                | : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI   |
| Tempat                          | : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  |
| Peserta Rapat Hadir dan Virtual | : A. Fisik 27 orang Virtual 18 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;<br>B. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo, beserta jajaran. |

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.00 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Demi meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak untuk:
  - a. Meningkatkan upaya terobosan strategi perluasan kepesertaan dengan melakukan kerjasama dengan para *stakeholder*, baik pekerja formal maupun informal termasuk Pekerja non ASN di lingkungan K/L;
  - b. Mensosialisasikan secara massif kepada masyarakat tentang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. Mendorong regulator untuk menyempurnakan regulasi tentang alokasi program TJSL (*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*) yang digunakan untuk kepentingan peserta;
2. Komisi IX DPR RI mengingatkan kembali hasil kesimpulan RDP pada 4 Oktober 2021 tentang langkah investasi yang mempertimbangkan kehati-hatian, keamanan dana dengan hasil investasi yang memadai, menghindari penempatan investasi yang potensial menimbulkan kerugian dan memberikan laporan Investasi tiap semester kepada Komisi IX DPR RI mulai pada Maret 2022.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan data terkait:
  - a. Rincian Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan aturan dalam rangka tindaklanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - b. Akumulasi data peserta yang sudah jatuh tempo dan belum mengambil manfaat;
  - c. Asset dana Jaminan Sosial dan Asset BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. Rincian dana operasional BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. Rencana kerja dan portofolio program kerja BPJS Ketenagakerjaan;
4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini dan diserahkan paling lambat 27 Januari 2022

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB.

Jakarta, 20 Januari 2022

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA**  
A-331